

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat beberapa perilaku yang dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. oleh karena itu perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati oleh aturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Berbagai pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan (iptek), kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini kemungkinan akan terjebak dalam pola asosial yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Dari hal itu menjadikan banyaknya masyarakat yang masuk dalam penjara atau sebagai narapidana. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 1.

(Undang-Undang Pemasyarakatan). Sedangkan pengertian Terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan itu adalah salah satu institusi negara yang ditugaskan untuk menampung narapidana atau anak didik yang telah dinyatakan oleh hakim melalui putusnya atau kadangkala dipakai juga untuk pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh Polisi, Jakasa maupun Hakim.<sup>3</sup> Secara historis sejak tahun 1963 di Indonesia dikenal istilah Pemasyarakatan. Istilah tersebut merupakan pengganti istilah Pemenjaraan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Undang-Undang Pemasyarakatan), diatur bahwa pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas sesuai sistem kelembagaan yang telah diatur, serta cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina serta masyarakat, untuk meningkatkan kualitas perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>3</sup> Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: VETLAS, 2008), hlm. 88.

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.<sup>4</sup> Selain memperhatikan hal itu Lembaga Pemasyarakatan juga harus memenuhi segala hal yang menjadi hak narapidana.

Adapun yang menjadi hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan;
8. Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 77-78.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lebih khusus lagi mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya Nomor 99 Tahun 2012.<sup>6</sup> Penulis akan mengambil contoh salah satu hak yang dimiliki narapidana yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Ketika seseorang menyandang status sebagai narapidana (istilah sekarang warga binaan) seringkali merasa hidupnya sudah tidak berguna, menjadi “sampah masyarakat” dan menganggap masa depannya suram. Oleh karena itu kemudian menjadi permisif terhadap dirinya dan menjalani program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hanya untuk sekedar menghabiskan masa pidananya. Akibatnya setelah bebas, narapidana merasa tidak mendapat pencerahan di Lembaga Pemasyarakatan dan kepribadiannya tidak berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial diperlukan agar narapidana menyadari kesalahannya, serta tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab dilingkungan tempat tinggalnya.

Di sinilah pentingnya pembinaan pendidikan dan pengajaran agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan seorang warga binaan bisa menjadi warga yang baik dan mendapatkan pelajaran yang baik selama menjalani kehidupannya di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selama ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terdapat dikotomi tentang pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang menjadi domain seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) dan pembinaan keterampilan yang menjadi domain seksi Kegiatan Kerja. Secara struktural dikotomi itu sangat diperlukan untuk memperjelas tanggungjawab kerja masing-masing seksi tapi secara fungsional seharusnya kedua jenis pembinaan tersebut bisa saling melengkapi. Untuk mengintegrasikannya maka diperlukan sebuah program yang bisa mengakomodir keduanya yaitu Pendidikan Karakter bagi narapidana.

Pendidikan karakter bagi seorang narapidana pada umumnya dilaksanakan secara lisan baik secara perorangan maupun kelompok, namun belum terpolakan secara sistemik dan sistematis. seperti ketika petugas mengingatkan narapidana yang membuang sampah sembarangan terhadap akan pentingnya kebersihan, mengingatkan narapidana yang makan di tempat umum ketika bulan Ramadhan agar menghormati para narapidana lain yang sedang menjalani ibadah puasa, serta memotivasi para narapidana ketika mereka sedang mempunyai masalah keluarga. Namun cara-cara tersebut belum efektif karena tidak bisa menjangkau seluruh narapidana sehingga diperlukan program yang bersifat menyeluruh agar karakter-karakter yang baik itu bisa tertanam di setiap sanubari narapidana.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan karakter bersifat situasional yang bisa dilaksanakan di dalam kelas (*indoor*) maupun di luar kelas (*outdoor*) tergantung dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Dengan strategi belajar mengajar yang inovatif, diharapkan narapidana antusias mengikuti program ini sehingga tujuan akhir program ini bisa tercapai dan sesuai dengan apa yang telah tercantum

dalam rancangan KUHP nasional, yaitu mengenai tujuan penjatuhan pidana atau disebut dengan tujuan pemidanaan yakni:<sup>7</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c. Menyelesaikan konflik-konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dari konflik yang timbul serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sejatinya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membenuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yaitu dengan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Penulis tertarik dalam hal pemenuhan hak pendidikan karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan modal utama suatu bangsa untuk melakukan pembangunan. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan hak politik. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia dan merupakan sarana mutlak yang diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 33.

Pendidikan akan mengantarkan seseorang untuk dapat dipilih dan memilih dan berperan dalam pemerintahan. Pendidikan juga mengantarkan seseorang untuk dapat membaca kartu suara dalam pemilihan umum, sehingga pilihan yang diberikan adalah pilihan yang sehat dan bukan pilihan buta.<sup>8</sup> Semua manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan tak terkecuali, seorang warga binaanpun berhak atas pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB X A tentang Hak Asasi Manusia. Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SEBAGAI MODEL PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang ?

---

<sup>8</sup> Supriyatno Abdi, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 26-27.

2. Bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta referensi dalam hal menambah pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmu ilmiah dan ilmu alamiah terhadap perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan edukasi secara yuridis kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model



pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

**a. Kegunaan Penelitian**

**1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman baru di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam rangka menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana yang terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum.

**2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas permasalahan yang diangkat bagi penulis, sehingga masyarakat mampu memahami pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

**3. Bagi Petugas Lapas**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang agar dapat menjalankan tugas

dan fungsi sesuai dengan amanah negara agar mendapat tanggungjawab serta tidak menimbulkan kerugian bagi para narapidana.

#### 4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan secara alamiah mengenai objek study yang diangkat, sehingga para mahasiswa khususnya dapat berinisiatif dalam regenerasi calon penegak hukum ditengah masyarakat yang di cita-citakan.

#### a. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai norma atau kaidah, dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita di masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis langsung turun kelapangan dan melihat secara langsung di Lapas Wanita Kelas II A Malang.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisa terkait dengan persoalan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang serta bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

##### 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>9</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung. Penerbit Alfabeta, 2013.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena dalam penelitian ini penulis menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang sebagai objek penelitian. Penulis akan mengambil data-data langsung dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah jenis yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan responden terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang serta bagaimana kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan sebagai model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Malang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undang, buku-buku literatur maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan penulis.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data hukum primer atau data hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal, kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>10</sup>

#### 4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau sekarang menjadi penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik. Dalam ini melalui orang-orang tertentu yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen yang ada yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Serta dokumentasi dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>10</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 106.

mengambil gambar (foto), dan merekam suara responden terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari berbagai literatur atau buku-buku ataupun jurnal.

e. Internet

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya.

5. Analisa Data

Seluruh data baik yang berasal dari kepustakaan maupun dari studi lapangan yang terkumpul dianggap cukup maka data akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan keadaan subyek atau obyek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis akan menyajikan 4 (empat) bab dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisannya. Sistematika ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan/Penelitian, Metode Penulisan/Penelitian Hukum, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul serta menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun skripsi. Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Serta didalamnya berisi tentang analisis dan pemecahan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penutup berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.